



Inovasi Pembayaran Digital: Implementasi QRIS Sebagai Metode Pembayaran Non-Tunai Pada UMKM di Kota Kalianda

Supriyanto[✉], Alfina Zsazsa Naqiya¹, Fakhrrur Rozi¹, Tiyas Apriza¹

¹Universitas Indonesia Mandiri, Lampung, Indonesia

[✉]Corresponding Address: supriyanto034@gmail.com

<i>Received</i> 21-06-2025	<i>Revised</i> 21-07-2025	<i>Accepted</i> 30-07-2025
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

ABSTRAK

Transformasi digital di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan inklusivitas ekonomi. Salah satu bentuk inovasi pembayaran yang berkembang adalah penggunaan *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode pembayaran non-tunai. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal sistem pembayaran berbasis qris atau non-tunai. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terstruktur dan penyuluhan langsung kepada pelaku UMKM. Subjek kegiatan adalah 60 UMKM yang tersebar di wilayah Kota Kalianda. Hasil survey menunjukkan bahwa 47 persen pelaku usaha telah menggunakan QRIS namun mengeluhkan potongan biaya, 30 persen belum pernah menggunakan sistem pembayaran digital, dan 23 persen menggunakan metode transfer bank atau *e-wallet*. Setelah dilakukan penyuluhan, sebanyak 18 UMKM menyatakan minat dan langsung mendaftar untuk implementasi QRIS. Temuan ini memperkuat literatur sebelumnya mengenai pentingnya literasi digital dan dukungan kebijakan dalam keberhasilan transformasi pembayaran digital. Studi ini merekomendasikan perlunya sosialisasi berkelanjutan, evaluasi biaya transaksi, serta peningkatan infrastruktur digital untuk mendorong adopsi QRIS secara lebih luas di kalangan UMKM.

Kata kunci: QRIS; UMKM; Pembayaran Non-Tunai; Inovasi Digital; Transformasi Ekonomi

ABSTRACT

Digital transformation in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is a strategic step in enhancing economic efficiency and inclusivity. One of the emerging payment innovations is the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a non-cash payment method. This outreach program aims to introduce the community to QRIS-based or non-cash payment systems. This community service activity employed a descriptive qualitative approach using structured interviews and direct counseling with MSME actors. The subjects of the activity were 60 MSMEs located in the Kalianda City area. Survey results showed that 47 percent of business owners had already used QRIS but complained about transaction fees, 30 percent had never used any digital payment system, and 23 percent were using bank transfers or e-wallet methods. Following the counseling session, 18 MSMEs expressed interest and immediately registered to implement QRIS. These findings support previous literature on the importance of digital literacy and policy support in the success of digital payment transformation. The study recommends the need for continuous outreach, evaluation of transaction fees, and improvements in digital infrastructure to encourage broader adoption of QRIS among MSMEs.

Keywords: QRIS; MSMEs; Cashless Payments; Digital Innovation; Economic Transformation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk inovasi digital yang berkembang pesat dalam sistem pembayaran adalah penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS), yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran berbasis QR code yang terintegrasi dan inklusif. QRIS menjadi solusi pembayaran non-tunai yang efisien dan fleksibel untuk UMKM di Indonesia.

Di Kota Kalianda, adopsi QRIS pada pelaku UMKM masih menunjukkan variasi penerimaan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 60 pelaku usaha, sebanyak 47% telah menggunakan QRIS namun mengeluhkan adanya potongan biaya transaksi. Sebanyak 30% belum pernah menggunakan metode pembayaran digital, dan 23% menggunakan sistem transfer bank atau e-wallet. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemahaman, kepercayaan, serta kesiapan infrastruktur digital di kalangan UMKM.

Penyuluhan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal sistem pembayaran berbasis qris atau non-tunai. Sebagaimana implementasi QRIS dapat mendorong efisiensi transaksi dan memperluas pasar UMKM di Kota Kalianda, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terstruktur dan penyuluhan langsung kepada pelaku UMKM. Subjek kegiatan adalah 60 UMKM yang tersebar di wilayah Kota Kalianda. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi selama kegiatan sosialisasi dan penyuluhan QRIS. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sebagai upaya intervensi, dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai manfaat dan cara penggunaan QRIS. Setelah kegiatan penyuluhan, dilakukan pemantauan lanjutan terkait minat dan kesiapan pelaku usaha untuk mengadopsi metode pembayaran digital tersebut.



Gambar 1. Tim Seleksi Melakukan Penyuluhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei terhadap 60 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diketahui bahwa 47% atau sebanyak 28 UMKM telah mengadopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital. Namun demikian, sebagian besar dari mereka menyampaikan keberatan terkait biaya potongan atau merchant discount rate (MDR) yang dikenakan pada setiap transaksi. Biaya ini dinilai memberatkan, terutama bagi pelaku usaha skala mikro dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adopsi teknologi pembayaran digital meningkat, aspek keberlanjutan dan keterjangkauan sistem pembayaran masih menjadi perhatian utama dalam implementasinya.

Sementara itu, sebanyak 30% atau 18 UMKM belum mengimplementasikan metode pembayaran digital seperti QRIS. Mereka mengemukakan beberapa alasan utama, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap teknologi digital, kurangnya pendampingan teknis, serta ketidakpercayaan terhadap sistem digital, khususnya terkait keamanan data dan transaksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk edukasi dan literasi digital yang lebih masif serta pendampingan yang berkelanjutan, agar pelaku UMKM dapat merespons perubahan sistem pembayaran secara adaptif.

Adapun 23% atau sekitar 14 UMKM memilih menggunakan transfer bank atau dompet digital (e-wallet) sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Pilihan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses dan biaya transaksi yang lebih fleksibel. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam pemanfaatan teknologi pembayaran, adopsi QRIS sebagai sistem yang terstandarisasi masih menghadapi tantangan dari sisi biaya, kepercayaan, dan pemahaman pengguna.



Gambar 2. Tim PkM Membantu pelaku UKM mendaftarkan Qris

Setelah dilakukan penyuluhan, sebanyak 18 UMKM mendaftarkan diri untuk mengimplementasikan sistem QRIS sebagai metode pembayaran usahanya. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Natasia (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pendampingan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan UMKM terhadap QRIS sebagai inovasi digital. Khaerudin (2021) juga menegaskan bahwa digitalisasi UMKM melalui QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat daya saing usaha di era transformasi digital.

Lebih lanjut, Kusdiana (2022) mengungkapkan bahwa e-payment berbasis QRIS sangat membantu pelaku usaha dalam mempermudah transaksi dan meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen milenial. Namun demikian, Kristanty (2023) menyoroti tantangan keamanan digital dan pentingnya literasi keuangan digital di kalangan pelaku usaha. Kritik terhadap biaya transaksi QRIS yang masih dianggap memberatkan oleh sebagian pelaku usaha di Kalianda mencerminkan temuan Muhammad (2023) yang menyebutkan perlunya solusi disruptif untuk mendukung keberlanjutan penggunaan QRIS, termasuk dalam aspek regulasi biaya dan edukasi berkelanjutan.

Implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Kota Kalianda menunjukkan potensi besar dalam mendukung akselerasi transformasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan sistem pembayaran non-tunai ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperluas inklusi keuangan digital dan meningkatkan efisiensi transaksi bisnis, khususnya di sektor informal dan usaha skala kecil. QRIS memberikan kemudahan dalam bertransaksi, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, melalui sistem yang cepat, aman, dan terintegrasi. Meskipun demikian, proses adopsi QRIS di tingkat UMKM tidak terlepas dari berbagai kendala. Dua faktor utama yang menjadi hambatan signifikan adalah adanya potongan biaya transaksi atau merchant discount rate (MDR) yang dianggap membebani pelaku usaha kecil, serta masih rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar UMKM. Kedua kendala ini berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi dan keberlanjutan penggunaan QRIS dalam operasional bisnis sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan minat mereka terhadap penggunaan QRIS. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, edukasi digital mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi bisnis. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, perbankan, dan stakeholder lainnya, adopsi QRIS di Kota Kalianda berpotensi untuk terus meningkat dan memperkuat ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

Keberhasilan implementasi QRIS sebagai bagian dari transformasi digital UMKM tidak hanya bergantung pada kesiapan pelaku usaha, tetapi juga menuntut adanya sinergi antarpemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi strategis antara

pemerintah daerah, penyedia layanan keuangan (bank dan fintech), serta institusi akademik untuk menyelenggarakan program pelatihan literasi digital secara berkala dan terstruktur. Selain aspek literasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap skema biaya transaksi QRIS, khususnya merchant discount rate (MDR), agar lebih adaptif dan proporsional terhadap kapasitas finansial UMKM, terutama yang berada pada kategori mikro dan kecil. Skema biaya yang lebih inklusif akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk beralih ke sistem pembayaran digital tanpa merasa terbebani oleh potongan transaksi yang signifikan. Di sisi lain, penguatan infrastruktur digital merupakan faktor krusial yang tidak dapat diabaikan. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan merata menjadi prasyarat penting dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan aktivitas bisnis UMKM secara keseluruhan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasi teknologi seperti QRIS akan menghadapi kendala teknis yang berdampak pada rendahnya adopsi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan guna memastikan keberhasilan transformasi digital UMKM di daerah seperti Kota Kalianda.

DAFTAR PUSTAKA

- Khaerudin, D. (2021). Digitalisasi UMKM dalam Inovasi Pemasaran Produk dan Pembayaran Digital pada Pelaku Industri Rumahan di Desa Kronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Digital*, 4(1), 15–25.
- Kristanty, D. N. (2023). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan QRIS dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Keamanan Siber dan Finansial*, 7(2), 112–124.
- Kurniawati, E. T. (2022). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada Kelompok Milenial. *Jurnal Literasi Digital*, 5(3), 55–64.
- Kusdiana, Y. (2022). Penerapan e-Payment Menggunakan QRIS sebagai Inovasi untuk Mempermudah Transaksi pada Talenta Cafe di Jalan Kasah. *Jurnal Inovasi Teknologi dan UMKM*, 3(2), 77–89.
- Muhammad, H. A. (2023). Keberlanjutan QRIS: Memahami Tantangan dan Merancang Solusi Disruptif. *Jurnal Sistem Pembayaran Digital*, 2(1), 20–35.
- Natasia, L. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan QRIS Sebagai Inovasi Pembayaran untuk Kemajuan UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Digital*, 6(1), 40–52.
- Tobing, G. J. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Regulasi dan Transformasi Keuangan*, 8(4), 101–115.